BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Rangkaian pergolakan *Arab Spring* yang pecah pada bulan Desember 2010 lalu telah menyeret Yaman ke dalam pusarannya sejak bulan Januari 2011. Konflik yang melibatkan kekuatan-kekuatan dominan (*key players*) di Yaman sangat menentukan terjadinya eskalasi ketegangan. Kekuatan Muslim Sunni di wilayah selatan, Syi'ah al-Houthi di wilayah utara, dan rezim pemerintahan di ibukota terlibat konflik bersenjata dan perebutan pengaruh sejak saat itu. Sementara itu, unsur-unsur Gerakan Yaman Selatan (*Southern Movement*), suku-suku lokal, serta kepentingan regional dan internasional dari negara-negara berpengaruh juga turut hadir di Yaman dalam ranah politik yang cukup rumit.

Pada tahun 2012, situasi *chaos* mendera Yaman menyusul pengepungan istana dan pelengseran pemerintah yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Syi'ah al-Houthi yang menjadi salah satu unsur penting dalam persoalan Yaman. Gerakan kelompok bersenjata al-Houthi bangkit dengan mengusung isu untuk mendapatkan otonomi kekuasaan dari pemerintah Yaman, serta memperbaiki kerusakan tatanan sosio-ekonomi dan marjinalisasi historis atas kelompok mereka. Masa transisi yang dilalui Yaman sejak lengsernya Ali Abdullah Saleh – dengan ditandatanganinya pernyataan pengalihan kekuasaan ke tangan Abdu Rabbu Mansour Hadi pada tanggal 23 November 2011 yang dimediasi oleh *the Gulf Cooperation Council* (GCC) – pada akhirnya menempatkan Yaman sebagai sebuah *failed state*.

Sebagai negara miskin di kawasan Timur Tengah, rakyat Yaman berada dalam kondisi yang tidak sejahtera. Ekonomi yang carut marut dan ketidakstabilan dalam bidang sosial, politik, dan keamanan membuat Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi dinilai tidak dapat membawa keadaan Yaman menjadi lebih baik. Momentum tersebutlah yang digunakan oleh pemberontak Houthi untuk mengambil alih pemerintahan dengan dukungan dari Iran.

UPN "VETERAN" JAKARTA

Adapun secara kronologis, pergerakan Arab Saudi ke Yaman sejatinya telah dimulai pada bulan November 2009, dimana sebelumnya telah terjadi pergolakan antara pemerintah Yaman melawan kelompok al-Houthi yang terus mengadakan perlawanan dan meluas hingga menyentuh wilayah perbatasan Yaman-Arab Saudi. Tindakan al-Houthi yang telah masuk ke wilayah perbatasan ini dikecam oleh pemerintah Arab Saudi. Setelah tiga bulan berkonflik, al-Houthi akhirnya setuju untuk melaksanakan gencatan senjata pada bulan Februari 2010. Adapun pada tahun 2015, Arab Saudi kembali terlibat dalam konflik internal Yaman.

Arab Saudi sebagai negara tetangga yang sangat dekat dengan Yaman merespon konflik tersebut dengan kembali melakukan serangan militer untuk menyerang al-Houthi yang telah berhasil mengambil alih ibu kota Yaman, Sana'a pada tahun 2015. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi Arab Saudi untuk mengeluarkan kebijakan tersebut, faktor tersebut ada yang datang dari dalam negeri (internal) dan juga dari luar negeri (eksternal).

Faktor internal yang mempengaruhi kebijakan tersebut diantaranya adanya kepentingan ekonomi karena pantai Yaman merupakan jalur perdagangan minyak dunia, dimana Arab Saudi memiliki kepentingan ekonomi untuk menjaga stabilitas keamanan Selat Bab al-Mandeb serta Teluk Aden karena perekonomian Arab Saudi tergantung kepada perdagangan minyak, dimana kedua wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat strategis bagi jalur perdagangan minyak yang menghubungkan Laut Merah dan Terusan Suez. Oleh karena itu, Arab Saudi memiliki faktor kepentingan ekonomi yang menjadi salah satu faktor internal yang menyebabkan Arab Saudi dirasa perlu untuk melakukan intervensi militer terhadap al-Houthi di Yaman. Kemudian, sistem pemerintahan Arab Saudi yang berbentuk *monarkhi absolute* dikhawatirkan akan menerima ekspor revolusi yang akan meruntuhkan sistem *monarkhi absolute* tersebut jika al-Houthi benar-benar berhasil menguasai Yaman. Oleh karena itu, Arab Saudi memberlakukan strategi militer dalam negeri dengan cara memarjinalisasikan kaum Syi'ah maupun kaum yang menuntut demokratisasi guna mencegah runtuhnya sistem *monarkhi absolute* tersebut.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi tindakan intervensi militer Arab Saudi terhadap al-Houthi, yaitu terdapatnya konflik kelompok identitas Sunni-Syi'ah. Adanya ancaman dari Iran yang memberikan dukungan serta bantuan kepada al-Houthi membuat Arab Saudi harus melakukan serangan militer terhadap al-Houthi untuk menghadapi dan menghadang pengaruh Iran di Yaman karena demikian, Iran tidak terlibat langsung dalam pertempuran militer yang berlangsung, namun Iran berdiri dibelakang kelompok al-Houthi yang juga menganut paham Syi'ah. Faktor eksternal lainnya, yaitu Arab Saudi menerima permintaan untuk melakukan intervensi militer dari Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi yang tidak mampu menangani pemberontakan kelompok bersenjata Syi'ah al-Houthi, dimana PBB turut merespon permintaan Presiden Hadi yang ditandai dengan dikeluarkannya Resolusi DK PBB No. 2216. Adapun Arab Saudi dalam melakukan intervensi militer terhadap kelompok bersenjata Syi'ah al-Houthi pada tahun 2015 menghadapi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh faktor dari tubuh internal GCC dan faktor dari pihak al-Houthi.

IV.2 Saran

Arab Saudi telah melakukan intervensi militer terhadap al-Houthi yang dimulai sejak tahun 2004 dan berakhir pada tahun 2009, serta diakhiri pada tahun 2010 yang ditandai oleh kesepakatan perundingan damai. Namun demikian, perang adalah sebuah aktivitas yang sangat mahal. Karena itu potensi ekonomi dan geopolitik yang sangat besarlah yang menjadi *pivotal factor* (penyebab utama) bagi negara-negara kuat untuk menggelontorkan dana sangat besar untuk membiayai faksi-faksi yang berseteru di Yaman. Aktor asing terkuat di Yaman, tentu saja Amerika Serikat, sekutu terdekat Arab Saudi, yang sejak tahun 2001 menggelontorkan ratusan juta dollar (dana total sejak tahun 2008 hingga tahun 2010 yang diterima oleh rezim Saleh dari Amerika Serikat mencapai 500 juta dollar). Amerika Serikat juga menginvestasikan dana dan perlengkapan militer tercanggihnya di Pulau Sokotra. Di saat yang sama, Amerika Serikat meraup untung besar dari perdagangan senjata ke negara-negara Arab dan Teluk. Kemudian ketika pemerintahan boneka terbentuk, perusahaan-perusahaan

Amerika Serikat pula yang dipastikan akan mendapatkan berbagai kontrak infrastruktur dan minyak (seperti yang terjadi di Libya dan Irak).

Meskipun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Arab Saudi melakukan intervensi militer terhadap al-Houthi guna mencapai kepentingan nasional Arab Saudi dalam kebijakan luar negeri yang diambil, namun Arab Saudi tidak memperhatikan kerugian besar yang dihasilkannya, seperti biaya perang yang membengkak, jatuhnya banyak koban jiwa dari pihak warga sipil di Yaman, serta mendapat kecaman keras dari masyarakat internasional atas tindakan intervensi militer yang dilakukan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi hanya akan sia-sia atau tidak berujung karena yang dibutuhkan oleh Arab Saudi, yaitu strategi militer yang jitu tanpa merugikan pihak yang tidak bersalah manapun.